

PU tidak pernah memberitahu tentang proyek Rusunawa di Kupang tersebut. Untuk itu

masalah proyek Rusunawa di Kupang yang terbengkelai ini menjadi temuan dan akan

dipertanyakan saat rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan umum.

KPU BALI DIMINTA SERAHKAN DPT PILPRES

Komisi II DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali untuk menyerahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penyerahan DPT ini diperlukan untuk melihat jumlah akhir setelah dilakukan perubahan-perubahan dan mencocokkan apakah benar sebesar itu jumlah yang tidak terdaftar dalam DPT.

Demikian disampaikan Ignatius Mulyono (F-PD) saat memimpin Tim kunjungan kerja Komisi II ke Provinsi Bali, Rabu (15/6), yang juga diikuti empat belas anggota Komisi II lainnya.

Selain DPT, Komisi II juga meminta Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP 4) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan perubahan-perubahan DPT berikutnya serta DPT setelah Perpu Nomor 1 Tahun 2009 dikeluarkan.

Terhadap masalah DPT ini, anggota dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Lena Maryana Mukti mengatakan, walaupun Ketua KPU Provinsi Bali mengatakan tidak ada kendala yang berarti, namun Bali menjadi sasaran kunjungan Pansus Hak Angket DPT belum lama ini karena adanya pengaduan dari sembilan KPU.

Berdasarkan laporan yang disampaikan sembilan KPU di Provinsi Bali, mengadukan adanya pemilih fiktif sampai dengan 16.000 orang. Banyaknya pemilih yang belum terdaftar ini tentunya harus dicocokkan kembali.

Memang, kata Lena, temuan tersebut kebanyakan karena kesamaan nama pemilih, KTP ganda dan penggunaan nama warga yang telah meninggal. Namun tentunya hal itu perlu dilakukan pengecekan secara teliti. Karena jika benar jumlah 16.000 orang tidak terdaftar, itu adalah jumlah yang cukup besar.

Lena menambahkan, legitimasi dari Pemilu itu bisa berasal dari pendaftaran pemilih. Dan dari rata-rata daerah yang didatangi memang di hulunya itu yang menjadi problem (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil).

Padahal Dirjen Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri, dalam hal ini telah menganggarkan untuk pendaftaran pemilih ini. Namun di beberapa daerah anggaran itu dipertanggungjawabkan secara fiktif, karena kegiatan itu tidak dilakukan.

Jadi, kata Lena, data yang diambil itu bulat-bulat data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam hal ini, yang kena getahnya KPU, karena itu bukan riil data yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bahkan, ada juga yang tidak mau pusing-pusing, data DPT Pilkada itulah yang diambil dan diserahkan kepada KPU, dan KPU tidak tahu asal muasal dari data tersebut. Menurut Lena, single identity number menjadi muara beres atau tidaknya pelaksanaan pemilu. "Jadi domainnya memang bukan di KPU, tapi pemerintah," kata Lena.

Ketua KPUD Bali Lanang Perbawa mengatakan, untuk masing-masing DPT Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, pihaknya telah melakukan revisi sampai tiga kali.

Pada Pemilu Legislatif, revisi pertama berjumlah 2.666.461 pemilih, revisi ke dua mengalami penurunan sehingga jumlahnya 2.666.419 pemilih dan revisi ke tiga mengalami kenaikan menjadi 2.667.065 pemilih.

Sedang pada Pemilu Presiden, revisi pertama jumlahnya 2.695.320 pemilih, revisi ke dua 2.696.463 dan revisi ke tiga mengalami kenaikan lagi hingga jumlah keseluruhan 2.696.817 pemilih.

Menanggapi 16.000 orang yang tidak terdaftar dalam DPT, Lanang menjelaskan masalah itu sudah diselesaikan. Menurut Lanang, di Bali, banyak masyarakat yang sering berpindah-pindah dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain. Saat orang itu pindah, dia tidak melaporkan diri sehingga orang tersebut masih terdata di tempat asal. Disinilah timbulnya KTP ganda atau kesamaan nama pemilih.

Berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pemilih dapat menggunakan KTP atau Paspor, dalam hal ini pemilih yang menggunakan KTP di Bali sebanyak 9.000 orang dari kurang lebih dua setengah juta pemilih. (tt)

PEMANFATAAN PELABUHAN TENAU KUPANG MASIH RENDAH

Saat mengunjungi Pelabuhan Tenau Kupang, Kamis (16/7) Komisi V melihat bahwa tingkat pemanfaatan (utility) dari pelabuhan Tenau Kupang masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari aktifitas kepelabuhanan di Tenau Kupang, sangat sepi. Kalau pelabuhan-pelabuhan lain kegiatan hilir mudik kapal menonjol namun di Pelabuhan Tenau Kupang hal itu tidak begitu terlihat. Untuk itu Komisi V berharap agar infrastruktur Pelabuhan Tenau Kupang ini dapat meningkatkan ekonomi warga.

Sementara itu Ketua Komisi V Ahmad Muqom pada pertemuan dengan Administratur Pelabuhan Tenau Kupang

mengatakan bahwa Tata Kepelabuhanan Nasional saat ini masih kurang terbangun dengan baik. Otonomi tidak dilaksanakan secara efektif. Hal ini terlihat dari kurang lebih 4000 pelabuhan yang ada saat ini kurang tertangani secara efektif. Komisi V, lanjut Muqom sangat mendorong agar pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan ini dapat mendorong pelaksanaan fungsi pemerintahan dan bisnis. Ketua Komisi V juga berharap agar pihak management Pelabuhan Tenau Kupang dapat segera mengimplementasikan UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Masalah Air di Kupang

Sementara itu saat melakukan kunjungan ke PDAM Kupang, Komisi V mendapatkan penjelasan langsung dari Bupati Kupang Ayub Titu Eki yang mengusulkan perlunya dibangunnya jalan poros tengah yang diharapkan akan dapat membuka akses jalan 6 kecamatan di Kabupaten Kupang yang selama ini masih terisolir. Akses ke daerah tersebut selama ini, lanjut Bupati Kupang hanya bisa ditempuh melalui kendaraan roda dua. Akses jalan di jalur pantai utara sangat sulit untuk dikembangkan mengingat jalur tersebut harus melewati kurang lebih 100 jembatan besar dan kecil sehingga yang pasti akan membutuhkan dukungan anggaran yang sangat besar. Jalur pantai utara lebih cocok untuk dikembangkan sebagai daerah pengembangan jalur laut.

Selain masalah akses jalan yang sangat bermasalah, Bupati Kupang Ayub Titu Eki juga mengemukakan masalah kekurangan air yang setiap saat melanda Kupang. Bupati mengusulkan agar tiap-tiap desa bisa dibangun bendungan yang dapat menampung air pada musim penghujan hanya berkisar empat bulan setiap tahun. Selain itu perlu dikembangkan sumbu-sumur bor yang dapat menghasilkan air minum bagi penduduk.

Masalah lain yang muncul, lanjut Titu Eki adalah masih banyaknya warga yang kehidupannya mengandalkan ladang berpindah. Bupati mendorong agar warganya mau hidup dengan mengolah lading tetap sehingga akan memudahkan pembinaan untuk meningkatkan produksi pangan. Kondisi pertanian ladang berpindah inilah yang menyebabkan warga Kupang tetap miskin.

Masalah Jaringan dan Tingkat Kehilangan air

Sementara itu PLT Direktur Utama PDAM Kupang Masya Djonu mengatakan masalah pokok PDAM Kupang adalah Teknik pemipaan yang masih kurang, ketersediaan air baku yang masih sedikit serta persoalan jaringan distribusi. Masalah lainnya, lanjut Masya Djonu adalah tingkat kehilangan air di Kupang masih sangat tinggi sekitar 41 persen.

Dijelaskan Dirut PDAM Kupang bahwa untuk meningkatkan kinerja perusahaan, maka yang perlu dilakukan adalah mengurangi tingkat kehilangan air ini akan diupayakan bisa ditekan menjadi 23 persen tahun 2012, serta membenahi jaringan distribusi.

Menanggapi penjelasan Dirut PDAM Kupang, anggota Komisi V Aji Massaid mengatakan bahwa PAM Kupang perlu secara terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah. Sehingga diharapkan pemda dapat ikut melakukan sosialisasi terhadap warganya tentang tanggung jawab masalah kebutuhan air. Sehingga tingkat kehilangan air sedikit dapat teratasi.

Sementara itu Djoko Suwindi mengusulkan agar PDAM Kupang dapat melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk mencari solusi kekekeringan yang melanda secara terus menerus di Kupang. Sehingga bisa dicarikan solusi pemecahan kesulitan air bagi warga Kupang.

Hal senada diungkapkan Rahman Syagaff bahwa untuk mengurus air bersih di Kabupaten maupun Kota perlu memperhatikan Tata Ruang yang ada. Tidak

semua harus ada di kabupaten/kota. Untuk itu perlu koordinasi untuk menghindari konflik kepentingan di daerah tersebut.

Ketua Komisi V Ahmad Muqom mengatakan bahwa Komisi V sangat peduli terhadap kebutuhan primer masyarakat yang berupa air. Komisi V berjanji akan membantu mencari solusi terhadap masalah pengelolaan air di Kupang, tetapi Komisi V minta agar dilakukan terlebih dahulu peningkatannya kinerja termasuk kelembagaan PDAM. Komisi V melihat bahwa masalah pengelolaan air di Kupang bukan pada status kewenangan tetapi lebih pada kelembagaan. "Untuk itu perlu diselesaikan terlebih dahulu kelembagaan yang ada". Selain itu perlunya perencanaan penyulingan air secara besar-besaran sehingga diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang kekurangan air bersih.

KETUA DPR BERHARAP PESERTA CERDAS CERMAT DAPAT MENJADI WAKIL RAKYAT

Ketua DPR HR Agung Laksono berharap peserta cerdas cermat UUD 1945 tingkat SLTA se-Indonesia dapat menjadi Anggota DPR pada periode yang akan datang. Hal itu diungkapkannya saat menerima peserta di Ruang Paripurna DPR, Gedung Nusantara II, Kamis (23/7).

"Siapa tahu nantinya dapat duduk sebagai wakil rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang dicita-citakan, Indonesia yang berkesejahteraan, Indonesia yang berkeadilan, Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia," katanya dihadapan siswa dari 33 provinsi.

Dihadapan peserta, Ketua DPR menilai kegiatan cerdas cermat mempunyai makna yang cukup penting bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi generasi muda untuk dapat memahami kehidupan berkonstitusi dengan segenap aturan dasarnya.

"Baik yang tersirat dalam UUD 1945 beserta amandemennya dan berbagai peraturan perundang-undangan yang

relevan dengan jalannya pembangunan bangsa dalam kehidupan bernegara," ujarnya.

Menurut Agung Laksono, dengan bertemunya peserta dari seluruh Indonesia akan semakin mempererat tali persaudaraan yang pada gilirannya akan memperteguh nilai-nilai persatuan bangsa. "Namun demikian, sebagai generasi muda juga harus memiliki kelebihan sikap dan attitude yang dapat dibanggakan dalam hal pembangunan moralitas bangsa," katanya.

Lebih jauh, Ketua DPR menjelaskan bahwa saat ini DPR dalam hal fungsi legislasi masih belum optimal. "Artinya target Prolegnas periode ini sejumlah 284 RUU, baru diselesaikan sebanyak 176 atau sekitar 58,5%," jelasnya.

Sementara dalam menggunakan hak-hak Dewan dalam rangka pengawasan, saat ini DPR tengah memproses tiga Hak Angket yaitu Hak Angket BBM, Hak Angket Haji tahun 2008 dan Hak Angket DPT. (bs)

NASIB PUSTAKAWAN MEMPRIHATINKAN, DPR JANJI BERI INSENTIF

Terbatasnya sumber daya manusia tenaga pustakawan yang professional di bidang perpustakaan menjadi perhatian khusus Komisi X saat melakukan pertemuan dengan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. DPR berjanji akan memberikan tunjangan profesi kepustakawanan.

Dengan adanya tunjangan profesi pustakawan, diharapkan masyarakat semakin banyak yang ingin menjadi pustakawan," ujar Ketua tim kunjungan kerja Komisi X DPR, Irwan Prayitno (F-PKS) usai pertemuan di Kalsel, Selasa (14/7).

Jumlah pustakawan di seluruh Indonesia, tutur Irwan jumlahnya sangat sedikit dan sangat dirasakan kurang. Hal ini disebabkan sedikitnya motivasi masyarakat menjadi pustakawan dan kurangnya biaya tunjangan kesehatan.

"Ini akan menjadi suatu persoalan yang

perlu dibahas termasuk anggaran buku, pemeliharaan dan sebagainya," katanya.

Walaupun persoalan perpustakaan saat ini menjadi milik daerah tetapi menurut Ketua Komisi X DPR, tetap dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) perlu dianggarkan untuk melindungi keberadaan perpustakaan dan jumlah pustakawan yang semakin berkurang.

Sebelumnya Sekretaris Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Rusmiati Soekirno mengungkapkan permasalahan krusial adalah

terbatasnya tenaga professional yang berlatar belakang pendidikan (S1) Ilmu Perpustakaan termasuk tenaga terampil yang berlatar belakang (S1) teknologi informasi.

"Hal ini dirasakan ketika memasuki era teknologi informasi," katanya.

Kemudian, masih banyak perpustakaan yang belum memiliki tenaga professional di bidang perpustakaan terutama untuk perpustakaan/madrasah. Akibatnya banyak perpustakaan yang tidak dapat dikelola secara optimal.

"Untuk mengatasi hal ini perlu adanya kebijakan nasional dalam pengangkatan tenaga professional di bidang perpustakaan seperti halnya guru dan tenaga medis," ujarnya.

Dalam hal anggaran sekolah, UU No.43/2007 disebutkan anggaran perpustakaan sekolah adalah 5 persen dari anggaran sekolah belum dapat dilaksanakan dengan baik karena belum ada kesamaan apresiasi terhadap pentingnya penyelenggaraan perpustakaan sekolah oleh instansi lainnya yang seharusnya membina perpustakaan sekolah/madrasah tersebut. (da)

KOMISI X DPR KECEWA TIDAK DITEMUI GUBERNUR KALSEL

Tim Kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan membatalkan pertemuan dengan jajaran instansi Provinsi Kalimantan ketika mengetahui gubernur dan Kepala Dinas tidak ada di daerah dan hanya diwakilkan Sekretaris Daerah. Sementara Gubernur beserta Kepala Dinas sedang berada di Jakarta mengikuti acara coffee morning.

Kita kecewa, karena ini bukan pertama kali tetapi yang kedua tidak bertemu dengan Gubernur dan juga Kepala Dinas," ujar Ketua Tim Kunker Kunjungan kerja Komisi X DPR ke Prov. Kalimantan Selatan Irwan Prayitno (F-PKS) kepada Parlementaria, kemarin.

Padahal menurut Irwan, setiap kali Komisi melakukan kunjungan ke daerah, pihaknya selaku diterima oleh Gubernur. Komisi X DPR dalam rangka melaksanakan fungsinya di bidang pengawasan adalah melakukan kunjungan kerja setiap empat bulan sekali ke daerah. Pada masa sidang IV Reses Masa Sidang 2008-2009 Komisi X dibagi menjadi

tiga tim yakni Tim kunker ke Prov. Kalimantan Selatan, Prov. Lampung, dan Provinsi Papua.

Hal itu disebabkan, DPR mempunyai mitra kerja dengan Gubernur untuk melakukan koordinasi yang berhubungan dengan pusat dan daerah, seperti dana dekonsentrasi, dana alokasi khusus (DAK), implementasi undang-undang, pengawasan anggaran, serta beberapa kebijakan lain yang perlu disinergikan dengan pusat karena anggaran daerah lebih dari 90% adalah dari pusat sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak lebih dari 10%.

Sedangkan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, DPR memiliki hak budget menyusun anggaran pusat. Sehingga jika

pihaknya melakukan kunker ke daerah dan tidak bertemu dengan gubernur yang memegang kewenangan tertinggi di daerah kemudian diwakilkan pada Sekretaris Daerah maka dirasakan sia-sia.

"Sekretaris Daerah maupun Kepala dinas tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan karena mereka adalah pegawai yang ada dibawah gubernur," katanya.

Sehingga Irwan menegaskan untuk apa dipaksakan bertemu jika tidak di respon, sementara disisi lain pihaknya telah memberikan perhatian penuh kepada Kalimantan Selatan berikut rombongan tim anggota kunjungan kerja Komisi X DPR yang lengkap.

Jika seandainya Gubernur tidak bisa, Irwan mengungkapkan pasti daerah lain akan berebut untuk menerima pihaknya. Tim Kunker datang ke daerah tidak hanya membawa badan tetapi membawa beberapa kewenangan yang dimiliki untuk diteruskan ketika rapat di DPR Jakarta.

Lebih lanjut Irwan menuturkan jika ini adalah hak Gubernur dan Kepala Dinas untuk tidak menemui Komisi X. Namun, pihaknya juga mempunyai kewenangan tidak menemui

perwakilannya.

“Daerah tidak bisa hidup dari pusat baik dari segi anggaran maupun dari segi kebijakan maupun ada otonomi daerah tetapi dana sebagian besar dari pusat,” katanya.

Oleh sebab itu hubungan pusat dengan

daerah menjadi penting untuk disinergikan. “ini adalah contoh yang tidak baik,” ujarnya.

Komisi X DPR membidangi pendidikan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga. Di Pendidikan, lebih dari 200 triliun berasal dari pusat dan sebagian besar anggaran gaji,

tunjangan profesi guru, tunjangan fungsional dan tunjangan khusus yang menentukan adalah Komisi X.

“Sehingga kami ingin mendengar penjelasan gubernur terkait bidang kami,” tandasnya. (da)

KALIMANTAN SELATAN MINTA KEWENANGAN PELAKSANAAN UAN SECARA DESENTRALISASI

Sejumlah praktisi pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan meminta kewenangan Ujian Akhir Nasional diberlakukan secara Desentralisasi. Selama ini UAN lebih dianggap sebagai penentu kelulusan tanpa adanya peningkatan mutu pendidikan dan peran serta daerah dalam memberikan nilai.

Dengan desentralisasi maka ada kewenangan daerah dalam memberikan nilai pada ujian. Selama ini guru hanya diberi kewenangan mengajar, tetapi ketika ujian peran guru diabaikan,” ujar H. Mawardi selaku Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Kalimantan Selatan saat bertemu Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI yang dipimpin Irwan Prayitno (F-PKS) di kantor Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan, Selasa (14/7).

Dirinya juga menyesalkan penilaian UAN yang hanya berfokus pada nilai mata pelajaran. Karena tidak sedikit para murid yang mendapatkan nilai memuaskan dengan grade 9 tetapi dengan hanya satu mata pelajaran tidak lulus maka murid tersebut sudah dianggap tidak lulus UAN.

Mantan Kepala Wilayah Prov Kalimantan Selatan, Kasim sepakat jika kewenangan UAN dilaksanakan secara desentralisasi. Ia pun tidak setuju jika pelaksanaan UAN sebagai penentu kelulusan. UAN harus dilaksanakan sebagai bentuk tes peningkatan mutu pendidikan.

“Jika perlu UAN tidak ditujukan kepada murid tetapi kepada sekolah untuk menilai kemampuan dari para Kepala Sekolah, Guru, dan tenaga terlatih lainnya untuk menentukan standar sekolah,” katanya.

Lebih lanjut Kasim meminta UAN dilakukan peninjauan kembali atau bahkan mengalihkan fungsi sebagai pengendali peningkatan mutu pendidikan nasional daripada UAN lebih dianggap sebagai suatu masalah.

Menanggapi pernyataan, Ketua Komisi X DPR Irwan Prayitno (F-PKS) mengungkapkan

sikap Komisi X terhadap UAN sampai saat ini tidak ada keputusan mutlak untuk mendukung ataupun menolak UAN secara tegas. Dalam komisi ada Fraksi yang mendukung, menolak, dan ada yang berada di tengah-tengah.

“Konsekuensinya Komisi X sulit untuk memutuskan dengan posisi seperti itu. Semua keputusan fraksi mempunyai dalil yang sama-sama kuat,” katanya.

Sedangkan Hafidz Ma’some (F-PPP) menilai UAN harus tetap dilaksanakan tetapi tidak sebagai ukuran penentuan lulus atau tidak. Pada kenyataan, pemerintah bersikap terbalik dengan sikap UAN sebagai penentu kelulusan.

Permasalahan sekarang dengan diadakannya UAN adalah banyaknya murid yang tidak lulus UAN. Oleh sebab itu UAN perlu dilakukan evaluasi kembali apa tetap dilaksanakan atau tidak. Jika tetap dilaksanakan formatnya harus dirubah bukan sebagai

penentu kelulusan.

Dengan umur DPR yang tinggal 2 bulan, pihaknya akan tetap membuat catatan pekerjaan rumah bagi anggota Komisi X DPR mendatang. UAN harus dikembalikan sesuai dengan Undang-undang sebagai pemetaan.

“UAN tidak mendidik tetapi membuat peserta didik dan pendidik untuk menjadi tidak sportif,” ungkapnya. Contoh nyata, pendidik ketika ujian berlangsung banyak yang mengajar. Atau murid yang tidak siap melaksanakan UAN tetapi murid tersebut masih lulus.

Hafidz dapat memahami jika guru daerah mengeluh ketika dirinya telah bekerja sekian puluh tahun namun hasilnya tidak ada. Hal ini harus diperhatikan pemerintah dengan evaluasi diri.

“Siapapun yang menjadi menteri pendidikan maka UAN harus di evaluasi”. (da)

BALI DIHARAP JADI PILOT PROJECT PENYELESAIAN ADMINDUK

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq mengharapkan Provinsi Bali dapat menjadi pilot project penyelesaian administrasi kependudukan (Adminduk) di daerahnya.

Menurut Mahfudz, Bali dengan segala kekhususannya dan soliditas pemerintahannya baik di provinsi maupun di kabupaten/kota sangat

mungkin jika sistim administrasi kependudukan itu bisa diselesaikan lebih cepat ketimbang jadwal yang dimiliki oleh Departemen Dalam Negeri.



Demikian dikatakannya saat Komisi II melakukan pertemuan dengan Gubernur Bali dan jajarannya, Rabu (15/7) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Sayuti Asyathri (F-PAN) yang diikuti 14 anggota lainnya.

Mahfudz mengatakan, seharusnya Adminduk ini dapat diselesaikan tahun 2008 atau sebelum Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) berlangsung. Karena adminduk inilah yang akan dijadikan basis data pileg dan pilpres 2009. Namun, karena intinya adminduk itu belum selesai, maka buntutnya panjang hingga terjadi kekisruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Karena itu dia berharap, apabila di tingkat pusat masih banyak kendala yang dihadapi, alangkah baiknya level propinsi dapat memprakarsai menyelesaikan terlebih dulu sistem administrasi kependudukan ini.

Hal yang sama dikatakan Lena Maryana Mukti (F-PPP) bahwa DPT itu kisruhnya dimulai dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP 4) yang disusun oleh masing-masing dinas yang disampaikan ke provinsi. Karena DP 4 itu adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk menyusun dan disampaikan kepada KPU.

Menurut Lena, di provinsi lain bahkan ada yang tidak mau repot-repot. Mereka membuat DP 4 hanya berdasarkan data BPS dan tidak turun dari pintu ke pintu serta mempertanggungjawabkan anggarannya secara fiktif.

Akibatnya, kata Lena, DPS amburadul apalagi DPTnya jauh lebih amburadul. Dia sangat menyayangkan sekali seharusnya momen Pemilu ini diambil untuk menyelesaikan karut marutnya administrasi kependudukan yang pada satu titik nanti akan mengarah pada single identity number, satu penduduk hanya mempunyai satu kartu tanda penduduk dan kemanapun dia pergi tidak berubah nomonya.

Sehingga ketika KPU melakukan pemutakhiran data, maka yang namanya pemutakhiran pemilih itu sudah otomatis dan komputerise. "Semestinya hal ini disadari bahwa saat inilah seharusnya dimulai penertiban administrasi kependudukan yang ada," kata Lena.

Menanggapi permasalahan Adminduk, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan, sistem adminduk didaerahnya sedang diproses menuju single identity number. Menurut Made, untuk program ini,

provinsinya menjadi pilot project dari Depdagri.

Bahkan, kata Made, di beberapa kabupaten juga sudah mulai menerapkan, tapi karena dulu sempat terputus sistem itu, akhirnya mereka mengembangkan masing-masing dengan sistem yang bermacam-macam sehingga tidak klop.

KOMISI II DUKUNG USULAN GUBERNUR BALI BUAT SISTEM POLA KARIR

Komisi II DPR RI mendukung usulan Gubernur Bali untuk membuat suatu sistem perencanaan karir bagi jajaran pegawai negeri. Terhadap usulan tersebut, Komisi II menghargai dan akan menindaklanjuti usulan tersebut agar dapat segera terealisasi.

Demikian disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi Ryaas Rasyid, pada saat pertemuan dengan Gubernur Bali dan jajarannya dalam serangkaian kunjungan kerja Komisi II ke Provinsi tersebut, Rabu (15/6) yang dipimpin Wakil Ketuaannya Sayuti Asyathri (F-PAN).

Ryaas mengatakan, perencanaan sistem pola karir ini sangat diperlukan, mengingat dalam kurun waktu 64 tahun sampai sekarang kita masih belum punya satu pola karir. "Bagaimana kita akan mewujudkan good government, kalau sistem pola karir di pemerintahan tidak kita miliki," kata Ryaas.

Dia melihat di beberapa daerah, banyak pegawai didistorsi oleh pilkada. Begitu gubernur maupun bupati terpilih maka yang pertama diambil untuk duduk dalam pemerintahannya adalah dari tim suksesnya baik untuk ditempatkan sebagai kepala dinas atau asisten. Jadi, kata Ryaas, begitu gubernur dan bupati terpilih adalah menyingkirkan orang-orang yang dianggap tidak mendukung dalam pilkada.

Menurut Ryaas, hal ini sangat persepsif, seharusnya walaupun kita benci pada seseorang tapi jika orang itu punya kompetensi, maka orang tersebut harus ditempatkan pada posisi yang benar, tidak menempatkan berdasarkan perasaan.

Ryaas menghimbau kepada gubernur, jika menunggu sistem pola karir yang direncanakan dari pusat, tentunya akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi sambil menunggu,

Namun Made berharap, dalam waktu dekat sistem Adminduk di Provinsi Bali dapat segera diselesaikan. Sehingga apa yang menjadi harapan Komisi II DPR, Bali dapat menjadi pilot project yang dapat menyelesaikan lebih cepat dapat direalisasikan. (tt)

sebaiknya Bali bisa mengambil prakarsa sebagai pelopor bagaimana menerapkan satu pola karir yang berbasis kompetensi.

"Perlu dibangun satu standart minimum kompetensi, misalnya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, harus ada standart kompetensi minimal," kata Ryaas.

Sehingga jangan sampai terulang kembali kasus di beberapa daerah khususnya di Sulawesi Selatan dimana Kepala Dinas Pekerjaan Umum diisi oleh tamatan IAIN, hanya karena dia mempunyai hubungan dekat dengan bupati.

Hal ini, ujarnya, memang tidak dilarang oleh UU dan bupati mempunyai kewenangan menempatkan siapa saja hanya mengacu kepada pangkat.

Kalau Bali bisa memulai ini, bahkan mungkin nantinya model Bali bisa dipakai sebagai acuan untuk pola karir secara nasional. Suatu sistem karir pegawai negeri yang berbasis kompetensi yang dimulai dengan penetapan tentang standart-standart normatif tentang minimum politikasi dalam jabatan-jabatan strategis.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika menegaskan, sejak awal telah mengusulkan adanya keputusan presiden yang memberikan panduan dalam implementasi sistem pola karir di daerah.

Selama ini, kata Made, pihaknya telah berusaha menerapkan prinsip "the right man on the right place" berdasarkan latar belakang pendidikan, pendidikan teknis fungsional, serta pengalaman jabatan.

Menurut Made, dia juga menerapkan tidak adanya perpanjangan usia pensiun. Jadi begitu usia mencapai 56 tahun, saat itu juga pegawai tersebut harus pensiun. Hal ini diterapkan untuk memberi kesempatan kepada pegawai lain yang berpotensi, namun belum mendapat

kesempatan.

Untuk pembinaan karir, pihaknya memberikan kesempatan bagi PNS untuk

menempuh pendidikan lanjutan serta pendidikan diklat. Pada tahun 2009, anggaran diklat mencapai Rp 530 juta, sedang beasiswa

bagi mahasiswa S2 dan S3 mencapai Rp 234 juta. (tt)

KOMISI I DPR RI TINJAU TIGA PLB DAN RESMIKAN RRI DAERAH PERBATASAN

Sebanyak 12 Anggota Komisi I DPR RI didampingi 3 Sekretariat Jenderal DPR RI serta 6 Penghubung Departemen meninjau tiga Pos Lintas Batas (PLB) di Prop. Kalimantan Barat yang dimulai dari PLB di Aruk, Kabupaten Sambas.

Kita hari ini, akan melakukan perjalanan melalui darat ke Aruk untuk melihat secara langsung kondisi Pos Lintas Batas dilapangan, " kata Ketua Tim Komisi I DPR RI Theo L. Sambuaga dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar. Selasa (14/07).

Pemerintah Prop. Kalimantan Barat menaruh rasa kecewa, pasalnya hingga puluhan kali perwakilan dari Pemerintah Pusat datang ke Kalbar namun sampai sekarang persoalan perbatasan di Kalbar tetap sama. Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Kalbar Cristiandy Sanjaya.

Dalam kunjungannya Tim Komisi I DPR RI didampingi Bupati Sambas Burhanuddin Arasyid, pejabat Pemkab dan Muspida Sambas serta jajaran Kodam IV Tanjungpura.

Ia mengatakan, tujuan kunjungan kerja Komisi I DPR RI yaitu ke tiga PLB di Aruk Kabupaten sambas, Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, Jasa Kabupaten Sintang dan juga akan meresmikan RRI diperbatasan sekaligus meninjau Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) di Entikong.

Karena itu, kata Theo, Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke tiga kawasan yang akan dijadikan PLB tersebut, untuk menyerap aspirasi masyarakat dikawasan perbatasan agar mengetahui apa-apa saja yang menjadi kendala peresmian.

"Padahal Indonesia sudah siap membuka tiga PLB itu, dari segi pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, " katanya.

Sebelumnya, Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Khusus Perbatasan (BP2KKP) Kalimantan Barat yang sekarang berubah menjadi Badan Pengelolaan Kawasan

Perbatasan dan Kerjasama telah mengajukan tiga Perpres kepada Pemerintah Pusat.

Tetapi hingga kini Perpres itu belum disahkan, yaitu Perpres mengenai Badan Percepatan Pengembangan Kawasan Perbatasan Antarnegara, Perpres Rencana Tata Ruang (RTR) dan RTR Kasaba (Kalimantan, Sarawak dan Sabah).

Anggota Komisi I DPR RI Sabam Sirait, menyarankan agar Pemprom. Kalbar mengalokasikan dana khusus untuk membiayai program pembangunan di perbatasan.

Menurutnya, dana tersebut bisa bersumber dari bagi hasil pusat dengan daerah yang persentasenya dirundingkan bersama.

"Mesti daerah menyiapkan anggaran khusus untuk perbatasan. Tak perlu menuntut otonomi khusus. Memang saya nilai, pemerintah pusat masih kurang perhatian terhadap perbatasan."

Theo menambahkan, setelah melakukan kunjungan kerja tersebut pihaknya akan membawa permasalahan yang ditemukan dilapangan untuk dibahas pada Persidangan IV Tahun Sidang 2008-2009 mendatang.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Theo L. Sambuaga diwilayah perbatasan Entikong meresmikan siaran Radio Republik Indonesia (RRI).

"Bagi kami, ini merupakan terobosan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia untuk membangkitkan rasa kebangsaan dan memelihara persatuan serta citra nusantara di Wilayah perbatasan, " Kata Theo ketika meresmikan siaran Radio Republik Indonesia (RRI) daerah perbatasan. Rabu (15/07).

Theo juga mengatakan, salah satu fokus

kehadiran Radio daerah Perbatasan itu ialah memberdayakan masyarakat di sekitarnya agar semakin maju sekaligus tangguh menjadi benteng nusantara maupun etalase republik dalam pergaulan antarbangsa.

"Mari kita semua rakyat diperbatasan terus memelihara persatuan dan kesatuan serta menghargai pluralitas sebagai salah satu citra bangsa sekaligus kekuatan menentang berbagai intervensi asing," tandasnya dalam acara siaran langsung oleh RRI.

Stasiun Produksi RRI Entikong di kawasan Pos Pemeriksaan Lintas batas (PPLB) ini, menurutnya, dapaat menjadi 'sabuk pengaman' informasi bagi penguatan kedaulatan bangsa.

Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI, Pami Hadi mengatakan dengan diresmikannya "Siaran RRI Daerah Perbatasan", meskipun kecil di mata, tetapi dapat memperkuat kedaulatan NKRI.

Kedepan target kita akan melakukan siaran di sepanjang perbatasan Indonesia (Kalbar) – Malaysia Timur (Sarawak), dan di lima perbatasan, yaitu Pos Lintas Batas Aruk (Kab. Sambas), Jagoi Babang (Kab Bengkayang), Entikong Kab. Sanggau), Badau (Kab. Kapuas Hulu), PLB Jasa (Kab. Sintang).

Ia mengatakan, dengan diresmikannya Radio Perbatasan, merupakan bentuk RRI peduli dan melayani informasi, hiburan, pendidikan, kesehatan serta pelestarian budaya sebagai pemersatu bangsa.

"Dari sinilah akan terpancar informasi ke semua kawasan perbatasan dan seluruh Nusantara, bahkan keseluruhan dunia," katanya.

Stasiun RRI Daerah Perbatasan ini dipancarkan melalui gelombang FM3 KW dengan radius siaran 40 Km. (hindra)

KOMISI II TANYAKAN KEBERHASILAN PNPM GIANYAR DALAM MENGURANGI KEMISKINAN

Komisi II DPR RI menanyakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar sejauhmana keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dalam membantu mengurangi kemiskinan di daerah tersebut.

Pertanyaan ini diajukan saat Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Kamis (16/7) yang dipimpin Ignatius Mulyono (Fraksi Partai Demokrat).

Anggota Komisi II DPR Andi Yuliani Paris (F-PAN) mengatakan, pada prinsipnya Komisi II mendukung kelanjutan program nasional tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perjuangan Komisi II dalam meningkatkan anggaran PNPM-P, dimana pada tahun 2009 dianggarkan Rp 9,2 triliun, tahun 2010 menjadi Rp 10,5 triliun. "Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup tajam," kata Andi.

Jika sebelumnya PNPM-P belum menyentuh di seluruh kecamatan di Indonesia, dengan anggaran yang sebesar itu, Komisi II berharap PNPM-P dapat menyentuh sampai di seluruh kecamatan.

Bupati Gianyar Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan, PNPM di daerahnya menunjukkan keberhasilan yang sangat baik. Menurut Oka, adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan itu sangat membantu masyarakat kecil dalam mengembangkan usahanya.

Seperti pengusaha kecil di Pasar Sukawati yang termasuk di wilayah Kabupaten Gianyar, dana yang digulirkan untuk usaha kecil itu sebesar Rp 64 juta dan dapat menghasilkan Rp 651 juta. "Ini menunjukkan peningkatan yang luar biasa dari dana sebelumnya yang digulirkan," kata Oka.

Untuk itu, dia berharap program yang sangat baik ini tidak diputus dan dapat berkelanjutan terus. Menurutnya, program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin dalam mengangkat perekonomiannya.

Karena rakyatlah yang membuat perencanaan, rakyatlah yang melaksanakan program itu sendiri dan rakyat juga yang melakukan pengendalian. Karena perencanaan dibuat oleh rakyat sendiri, maka perencanaan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

Oka beranggapan, pola program yang diterapkan pemerintah ini cukup baik dalam ikut mengentaskan kemiskinan di berbagai daerah.

Menurut Oka, program ini sangat menyentuh rakyat dan sangat dirasakan manfaatnya. Selain program ini juga sangat transparan pengelolannya. Karena masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek dari program tersebut.

Lebih jauh Oka menjelaskan, di wilayah Gianyar ada empat program PNPM yang dijalankan yaitu PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP), PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan dan PNPM Mandiri Program Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

Mulai tahun 2003 sampai dengan 2005, yang mendapatkan alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) melalui program pengembangan kecamatan adalah masyarakat di tujuh kecamatan yang terdiri atas 62 desa dan 7 kelurahan.

Pada tahun 2006, pemerintah pusat hanya memberikan BLM kepada masyarakat di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Gianyar, Blahbatuh, Tegallalang dan Tampaksiring.

Sedangkan untuk tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2009, masyarakat kecamatan yang dialokasikan BLM di lima kecamatan yaitu kecamatan Gianyar, Tegallalang, Payangan, Sukawati dan Tampaksiring yang terdiri atas 53 desa/kelurahan.

Oka menambahkan, dari hasil evaluasi yang dilakukan selama ini, kendala yang dihadapi terhadap program ini adalah mengenai pengendalian pengelolaan dana bergulir.

Dalam hal ini Pemda telah melakukan langkah-langkah guna mengatasi kendala tersebut yaitu dengan memberdayakan kelembagaan yang sudah ada di masyarakat seperti Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dengan kelembagaan yang dimiliki seperti Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Verifikasi dan lain-lain.

Selain itu, juga melakukan penataan administrasi dan keuangan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Dalam hal ini UPK harus membuat perencanaan keuangan setiap tahun. (tt)

PERLU GRAND DESIGN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NTT

Komisi V DPR RI memandang perlu untuk segera dibuat grand design pembangunan infrastruktur di NTT yang saat ini kondisinya masih sangat memprihatinkan. Diakui bahwa setelah Komisi V melakukan kunjungan ke NTT 2004, sudah ada perkembangan yang mengembirakan meski masih sedikit.

Demikian antara lain temuan Komisi V DPR saat melakukan Kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur dari tanggal 14 s.d 16 Juli yang dipimpin Ketua Komisi V Ahmad Muqom yang diikuti 15 anggota Komisi V.

Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Demokrat C.P.S Massaid atau yang lebih dikenal Aji Massaid, mengatakan tentang perlunya grand design infrastruktur transportasi di NTT untuk jalur-jalur logistic" Hubungan antar moda harus terintegrasi sehingga bisa

menjangkau pulau-pulau terpencil” ungkap Massaid. Dengan konsep yang terpadu lanjut Aji Massaid, Trans NTT akan bisa dikembangkan. Menurut Aji Massaid NTT belum banyak perkembangan pembangunannya.

Hal senada diungkapkan Josef A. Noe Soi (FPG) bahwa pembangunan infrastruktur di NTT perlu konsep yang terpadu antara rencana pembangunan kabupaten/kota yang dikordinasikan dengan pemerintah pusat. Anggota dari dapil NTT ini juga mengusulkan agar NTT segera membangun pusat-pusat pertumbuhan. “Tak mungkin semua daerah kita bangun secara serentak”, tandasnya Josef.

Sementara itu Anggota Komisi V Djoko Suwindi meminta agar jalur utara Nusa Tenggara Timur segera segera diwujudkan. Jalur tersebut menurut Djoko Suwindi sangat dibutuhkan bagi pengembangan sector pertanian dan sector perkebunan. Sehingga hasil pertanian dan perkebunan di daerah seperti Manggarai tidak akan sia-sia. Selain itu Joko Suwindi mengusulkan bagaimana seluruh moda transportasi di NTT baik darat, laut dan udara dapat disinergikan dengan baik.

Ketua Komisi V DPR Ahmad Muqom juga mengatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir ini kecenderungan pembangunan infrastruktur di Indonesia hanya tumbuh sekitar 6 persen, sementara Negara-negara yang lain mencapai 10 hingga 16 persen. Untuk itu Komisi V mengakui bahwa sampai saat ini belum bisa mengakomodasi keinginan daerah untuk pembanguana infrastrukturnya.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Eston Nuai mengatakan bahwa NTT merupakan daerah yang sangat rawan kekeringan, mengingat hanya 4 bulan saja musim hujan (Desember-maret). Hal ini menyebabkan sebagian daerah sering mengalami paceklik sehingga kekurangan pangan. Belum lagi banyaknya serangan hama timus dan belalang.

Dijelaskan Estion bahwa saat ini NTT masih ada hampir 250 ribu pengungsi Timor Leste yang tentunya perlu penanganan yang memadai baik dari penyediaan pemukiman, dan makanan. “Ibratnya NTT itu orang miskin menanggung orang susah” cetusnya.

Meyinggung masalah infrastruktur, lanjut Wagub Eston, NTT adalah persoalan struktur tanah yang mudah bergeser terkena gempa mengingat NTT berada di daerah patahan.. Sehingga untuk perawatan infrastuktur

tersebut butuh dana yang besar.

Pulau Tidak bernama

Anggota Komisi V Djoko Suwindi juga menyoroti tentang banyaknya pulau-pulau di propinsi NTT yang belum banyak mempunyai nama. Untuk itu anggota Komisi V yang dari Yogyakarta meminta agar pemerintah NTT segera memberi nama bagi pulau-pulau yang sampai saat ini belum diberi nama tersebut.

Menjawab pertanyaan Komisi V DPR, Wakil Gubernur NTT mengatakan bahwa konsep pembangunan NTT berdasarkan rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/ Kota yang disinkronkan dengan rencana pembangunan nasional. Dijelaskan bahwa di jalur utara NTT sudah ada kawasan potensial sebagai daerah pengembangan.

Menyinggung tentang banyaknya pulau-pulau yang belum mempunyai nama dijelaskan bahwa pemerintah daerah sudah berusaha untuk memberikan nama-nama pulau-pulau yang belum mempunyai nama. Wagub memberi contoh Pulau Tikus, Pulau Kera dll. Namun diakui bahwa belum semua pulau dioberi nama.

Secara konsep rencana pembangunan terpadu sudah disiapkan pemerintah daerah akan tetapi banyak infrastuktur yang belum tersedia..

Masalah pembiayaan pembangunan infrastuktur di daerah adalah banyak masuknya jalan propinsi menjadi jalan nasional. Selain itu juga tumbuhnya kebutuhan perumahan bagi rakyat.

DPR MINTA TVRI KUPANG TINGKATKAN KREATIFITAS SIARAN

Anggota Komisi I DPR Imam Suhardjo (F-PPP) meminta seluruh staf LPP TVRI Kupang untuk meningkatkan kreatifitas dalam memproduksi siaran Televisi. Hal tersebut dikatakan Imam saat bertemu dengan jajaran LPP TVRI, RRI, LKBN Antara, dan KPID Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Kunker Komisi I DPR ke Provinsi NTT, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza (F-BPD), Rabu (15/7).

Diperlukan kreatifitas yang tinggi untuk memproduksi siaran agar tidak memakan biaya yang besar, mengingat anggaran TVRI Kupang sangat minim,” ujar Imam.

Imam mengakui tidak mudah mengelola LPP TVRI dan RRI di NTT karena kondisi geografis NTT yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan besar yang tersebar. Imam juga menegaskan, diperlukan anggaran yang cukup besar untuk menunjang kinerja LPP TVRI dan RRI di NTT.

Sementara itu, Kepala Stasiun LPP TVRI Kupang, Jani Yosef mengatakan, TVRI NTT merupakan stasiun penyiaran yang wilayah operasionalnya mencakup wilayah propinsi NTT, yaitu 21 Kabupaten yang tersebar di pulau Flores, Sumba, Timor, dan Alor.

Jani juga mengakui, selama 15 tahun terakhir ini, siaran TVRI sebagian sangat tidak bisa diterima dengan jelas karena kondisi

peralatan pemancar yang kurang baik, dan biaya pemeliharaan yang sangat terbatas.

Tetapi lanjut Jani, pada 18 Mei 2009 yang lalu siaran TVRI NTT sudah menjadi lebih baik pada semua arah. Peningkatan kualitas pemancar siaran dan penambahan jangkauan wilayah siaran TVRI ini karena mendapat peralatan baru bantuan dari Negara Spanyol dengan kekuatan yang lebih besar.

Jani menambahkan, untuk melakukan penghematan biaya, pihak TVRI NTT telah melakukan perangkapan profesi, dan sekali perjalanan dilakukan produksi banyak paket acara.

Jani juga meminta dukungan Komisi I DPR terkait upaya memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah terkait rencana penggunaan satelit, sehingga kondisi geografis yang sulit terjangkau siaran local dapat memperoleh jalan keluar.(olly)

KOMISI IX DPR TEMUKAN MINIMNYA SARANA- PRASARANA RSUD SAWAHLUNTO

Tim Komisi IX DPR menemukan masih minimnya sarana kesehatan termasuk lampu dan meja operasi di Rusah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawahlunto, Sumateea Barat. Dengan keterbatasan sarana pendukung itu, kegiatan operasi pasien yang seharusnya bisa diatasi RSUD, terpaksa dirujuk kerumah sakit yang lebih lengkap peralatannya.

Sebagian besar peralatan di RSUD Sawahlunto peninggalan zaman Belanda” keluh Direktur RSUD Sawahlunto dr. Eviniola, saat pertemuan Komisi IX DPR RI yang membidangi Kesehatan dan Ketenagakerjaan saat mengunjungi kota Sawahlunto, Sumbar, dikediaman rumah Wakil Wali Kota Sawahlunto, Erizal Ridwan baru-baru ini. Erizal Ridwan menjelaskan, dalam mengatasi kondisi tersebut perlu revitalisasi peralatan secara bertahap, diantaranya peralatan *rontgen*.

“Tahun 2007 RSUD mendapat bantuan dana perimbangan dari pusat Rp2 miliar, namun sejak tahun 2008 dan 2009, bantuan tersebut tidak diterima lagi. Karena itu kami berharap Komisi IX DPR RI bisa mencari solusi. APBD Sawahlunto dan dana alokasi khusus jelas tidak mampu memenuhinya” tutur Erizal Ridwan.

dr. Eviniola mengatakan, RSUD tipe C ini banyak dikunjungi pasien dari luar daerah seperti Kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya sekitar 52 %. Tingkat kunjungan rata-rata 4.000 orang per hari.

Dalam kunjungan kerja ini Komisi IX menerima informasi meninggalnya satu orang korban *Suspect* flu babi di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M. Jamil Padang. Meninggalnya pasien bukanlah kegagalan Dinas Depkes namun kelalaian yang ada pada pencegahan preventif yang tidak jalan.

Demikian penilaian Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IX DPRRI Hasanudin Said, Ak saat melakukan kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumbar pada Reses Persidangan IV Tahun Sidang 2008/2009 ini.

Dijelaskan Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR RI, Hasanudin Said, adanya *Suspect* flu babi di Rumah sakit Padang, karena ketidak mampuan mendeteksi *Suspect* flu babi di Bandara Padang, untuk itu DPR RI akan mengusulkan dalam penganggarannya tahun yang akan datang bisa dianggarkan alat mendeteksi *Suspect* flu babi, di Bandara

Padang

Direktur Umum, SDM dan Pendidikan RS Dr. M. Jamil Padang, Aguswan mengatakan, di RS tersebut telah menerima pasien yang terindikasi *Suspect* flu burung/babi, Minggu, (12/7) lalu tapi belum bisa dipastikan apakah pasien penderita *Suspect* flu babi, atau karena hal lainnya.

“Yang jelas kalau ada pasien yang mengalami demam tinggi dengan gejala klinis seperti gejala flu babi atau flu burung, akan diisolasi dan dirawat layaknya pasien yang positif terjangkit virus mematikan itu. Untuk kebenarannya akan diketahui dari hasil lab yang lebih akurat yang dikirim ke Jakarta,” ungkapnya.

Selanjutnya Aguswan mengatakan, RS Dr. M. Jamil Padang sudah berumur 56 tahun, didirikan pada tahun 1953, tahun 1998-2003 mendapat bantuan dari Austria (Vamed)

berupa alat-alat rumah sakit, dengan counter budget dari APBN untuk pembangunan gedung RS.

Banyak berobat ke In

Diakui Aguswan, dari Sumbar saja ada 6000 s/d 8000 orang per tahun berobat ke RS Malaysia dan Singapura, yang menjadi tantangan bagi RSUP M. Jamil, Padang, setelah diteliti sama saja fasilitas dan mutu RS Malaka, Kualalumpur dan Singapura. RS M. Jamil Padang hanya kalah karena iklan dan cara memberikan pelayanan serta sikap dan perilaku profider yang perlu diperbaiki.

Selain masalah layanan kesehatan, Kota Sawahlunto juga terbelit persoalan pengangguran. Terutama setelah ditutupnya kuasa pertambangan batu bara menyusul peledakan tambang dalam Bukit Bual 16 Juni lalu.

“Dari jumlah penduduk Sawahlunto 55.430 orang, angkatan tenaga kerja sebanyak 36.806 orang. Diantaranya bekerja 13.748 orang dan pengangguran 1.156 orang” ungkap Kadis Pemberdayaan masyarakat/ Ketenagakerjaan Sawahlunto, Maryusfi.

Selanjutnya Maryusfi mengatakan persoalan mendasar ketenagakerjaan adalah rendahnya ketrampilan. Mereka lebih banyak mencari nafkah sebagai pekerja kasar.

Disamping menampung aspirasi bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, Tim Kunker Komisi IX DPR RI juga meninjau obyek wisata Sawahlunto (ad)

KOMISI IX TEMUKAN SEJUMLAH PERAWAT DI MALUT BERSTATUS HONORER

Dalam kunjungan kerjanya ke RSUD Chasan Boesoeri Maluku Utara, Tim Komisi IX DPR dipimpin Wakil Ketua Umar Wahid Hasyim yang didampingi Wakil Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, manjumpai sejumlah perawat yang bersatus honorer. Untuk mengatasi hal itu Umar Wahid Hasjim (F-KB) mengharapkan agar pemerintah Provinsi mempercepat pengembangan infrastruktur rumah sakit.

Saat berada di ruang UGD (Unit Gawat Darurat). Kepala RSUD Chasan Boesoeri, Dr. Idhar Sidi Umar dihujani berbagai pertanyaan dari beberapa anggota DPR RI, terkait dengan penanganan pasien, jumlah para perawat, dan juga daya tampung RSUD. Yang menarik, Tim Komisi IX DPR mengorek soal kesejahteraan para pekerja atau SDM yang ada. Idhar menjelaskan, sejauh ini masih 30-an

tenaga perawat masih berstatus honorer dan gajinya sebesar Rp. 1 juta per bulan.

Terkait dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Anggota Komisi IX DPR Kasmawati Tahir Z. Basalamah mempertanyakan apakah RSUS Chasan Boesoeri pernah melakukan penolakan terkait dengan pasien yang menggunakan kartu Jamkesmas.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Idhar menjelaskan bahwa kebanyakan pasien yang datang ke RSUD tanpa membawa kartu Jamkesmas dan surat-surat yang menyatakan bahwa pihaknya adalah keluarga yang kurang mampu. Bahkan Menurut Idhar masyarakat masih tidak mengerti dan mengetahui prosedur yang telah diberikan. "masyarakat kurang memahami prosedur, tetapi pihak RSUD tetap melayani".

Anggota Tim Komisi IX DPR, Mariani Akib Baramuli (F-PG) menegaskan, terkait penanganan warga yang tidak mampu, agar jangan sekedar janji tetapi ditepati. "Nantinya saat warga tidak mampu datang masih lagi diwajibkan uang muka dulu baru dirawat," ujar Mariani.

Namun, kepala rumah sakit Idhar Sidi Umar langsung mengomentari terkait dengan pernyataan tersebut. " Sementara ini sudah ditangani sesuai dengan prosedur dan bagi mereka yang tidak mampu tetap akan dirawat. Dan kelasnya yang sudah kita kenal dengan kelas tiga itu". jelas Idhar.

Dipungut biaya

Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Maluku Utara, Komisi IX DPR menemukan dua pemegang kartu Jamkesmas justru di pungut biaya pengobatan. Kenyataan tersebut di temukan langsung Anggota Tim Kunker Komisi IX DPR yang di pimpin Umar Wahid Hasjim yang didampingi oleh 17 orang Anggota Tim Kunker saat melakukan peninjauan ke rumah sakit RSUD Jailolo, Maluku Utara.

Dua pasien tersebut adalah Flora Toly dan Yustina yang sementara menjalani perawatan di ruang IRNA (Instalasi Rawat Inap) kelas III. Keduanya menjelaskan kepada Ketua Tim, bahwa dirinya mengaku telah mengeluarkan ratusan ribu rupiah. "Saya masuk rumah sakit sudah dua hari, sudah kurang lebih Rp. 300 – Rp. 400 uang yang saya keluarkan untuk membayar biaya masuk dan membayar obat. Rinciannya biaya perawatan Rp. 150 ribu dan beberapa kali untuk biaya obat". Jelas Flora.

Salah satu anggota Tim Kunker Komisi IX yang ditemui usai melakukan peninjauan M.

Fansurullah Asa (F-PAN) mengatakan "rumah sakit ini bisa dikenai sanksi, karena memungut biaya berobat dari warga pemegang kartu Jamkesmas," tandas Fansurullah.

Politisi PAN itu mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan anggaran melalui APBN setiap tahun ke seluruh rumah sakit pemerintah di seluruh Indonesia untuk membayar tagihan biaya perawatan kesehatan para pemegang kartu Jamkesmas yang tak lain warga miskin dan kurang mampu. Tambah Fansurullah.

Atas kenyataan itu, Ketua Tim Kunker Komisi IX Umar Wahid Hasjim (F-KB) kemudian meminta direktur RSUD Jailolo Atty Tutupoho, agar memperbaiki manajemen pelayanan RSUD Jailolo jika tidak kasus tersebut bisa menjadi temuan dan akan diproses lebih lanjut. Jelas Umar.

Dirut RSUD Jailolo Atty Tutupoho yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa hanya obat yang masuk daftar Jamkesmas yang bebas biaya. Diluar daftar Jamkesmas, obat yang digunakan dikenakan biaya. (jay)

KOPEG SETJEN DPR TERIMA PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL

Wakil Ketua Komisi VI DPR Anwar Sanusi merasa senang dan sangat gembira sekali serta terharu atas anugrah atau penghargaan yang didapatkan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR yang diketuai oleh Helmizar.

Anugrah atau penghargaan yang didapatkan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR berdasarkan Peraturan Presiden yang diserahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali atas nama Presiden itu sangat baik untuk menjadi pemicu dan pendorong yang lebih baik lagi," jelasnya saat dihubungi Parlementaria usai menghadiri Hari Koperasi Ke-62 yang dibuka oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, di Stadion Madya Sempaja, Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (15/7).

Ia menambahkan, Ketua Kopeg Setjen DPR Helmizar yang juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Komisi VI itu memang tepat sekali. Karena Komisi VI membidangi Koperasi dan UKM yang sudah barang tentu Helmizar ini tahu persis tentang pemberdayaan-pemberdayaan tentang koperasi, jelasnya.

Menurutnya, siapa pun yang nanti akan

menjadi penggantinya akan berjalan dengan lebih baik lagi.

"Karena peletakan dasar-dasarnya yang dipimpin oleh Helmizar ini sudah baik dan sudah kuat," tutur Anwar Sanusi.

Artinya, yang sudah baik itu dipertahankan, tetapi perlu juga terobosan-terobosan yang sebetulnya menjadi kebutuhan anggota Kopeg Setjen DPR. "Sehingga sesuai dengan tujuan koperasi adalah mensejahterakan anggota Kopeg Setjen DPR," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Kopeg Setjen DPR Helmizar yang mengatakan, senang dan gembira mendapatkan Penghargaan Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional dan Penghargaan Bakti Koperasi dan UKM kepada Ketua Kopeg Setjen DPR.

"Penghargaan ini jarang didapat oleh koperasi-koperasi," kata Helmizar. Kkarena, lanjutnya, mungkin penilaian yang dilihat adalah

keberhasilan koperasi di dalam mendidik anggota koperasi. Anggota Kopeg Setjen DPR mengetahui hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi dan anggota Kopeg Setjen DPR juga mau memberikan sumbang saran untuk kemajuan koperasi, jelasnya.

"Jadi penghargaan ini adalah merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah melalui Menteri Negara Koperasi dan UKM," tegas Helmizar. Penghargaan ini, lanjutnya, adalah milik daripada seluruh anggota Kopeg Setjen DPR yang diserahkan kepada pengurus koperasi melalui ketua koperasi.

Menurutnya, anugrah atau penghargaan ini merupakan penghargaan yang layaknya diberikan kepada seluruh anggota Kopeg Setjen DPR. Jadi selaku ketua dan pengurus koperasi tidak akan bisa berbuat baik tanpa ditunjang dengan anggota yang mempunyai kritis dalam membangun terhadap Kopeg Setjen DPR kedepannya.

"Inilah yang diharapkan oleh Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR dan Staf Pengurus serta Pengawas Kopeg Setjen DPR," jelasnya.

Mudah-mudahan dengan adanya Penghargaan Koperasi Berprestasi Tingkat

Nasional oleh pemerintah melalui Menteri Negara Koperasi dan UKM, anggota Kopeg Setjen DPR itu harus lebih banyak mengkritisi

kepengurusan yang ada sekarang maupun kedepan nanti dan tidak tinggal diam.

“Sehingga Kopeg Setjen DPR akan lebih

maju dari yang ada sekarang ini,” tutur Helmizar. **(Iwan)**

KOMISI II DPR HARAPKAN HONORER DIANGKAT PNS

Komisi II DPR RI mengharapkan status tenaga honorer daerah yang sudah lama mengabdikan, untuk segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui mekanisme seleksi.

Jangan biarkan status tenaga honorer daerah itu mengambang, sehingga perlu juga dilihat nasib mereka,” kata Ketua Komisi II DPR RI, EE Mangindaan, saat melakukan kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta dalam rangka masa reses ke Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Rabu.

Mangindaan yang didampingi anggota Komisi II lainnya, yakni Rustam Tamburukan, Ferry Mursyidan Baldan, YH Laoly dan Chozin Chumaidy, mengharapkan pihak pemerintah

daerah memiliki database jelas jumlah tenaga honorer.

Anggota Komisi II lainnya, Ferry Mursyidan Baldan, meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), untuk menata kembali administrasi terkait tenaga honorer hingga ke daerah.

“Jangan ciptakan masalah baru bagi tenaga honorer karena tidak adanya penataan administrasi yang baik,” kata anggota Fraksi

Partai Golkar itu.

DPR sering menemukan banyak kasus terkait sejumlah tenaga honorer lama mengabdikan yang sudah masuk database namun tidak diangkat-angkat, sementara tenaga honorer baru langsung diangkat PNS.

Selain kunjungan kerja ke Pemprov Sulut yang diterima Asisten I bidang Pemerintahan, HR Makagansa, Komisi II DPR RI juga mengunjungi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pada pertemuan dengan KPU Sulut, DPR menyentil persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak optimal, sehingga berbuntut panjang bagi masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. **(nt)**

KUNJUNGAN BURT KE KONGRES AS UNTUK TUNJANG KINERJA DPR

Kunjungan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ke Kongres Amerika Serikat akan memfokuskan untuk mempelajari bagaimana organisasi, mekanisme kerja dan sumber daya manusia sebagai sistem pendukungnya.

Pertimbangan lain mengunjungi Kongres AS karena Amerika telah mempraktekkan demokrasi sangat lama dan telah menghadapi berbagai perubahan dimana parlemennya memiliki sistem pendukung yang sangat lengkap dan kuat untuk menunjang kinerja parlemen dalam menciptakan **check and balances** antar lembaga Negara.

Demikian ditegaskan Ketua BURT DPR Indria Octavia Muaja kepada pers Jumat (24/7) di Jakarta.

Menurut Indria, untuk rencana ini BURT DPR telah melakukan komunikasi dengan Kongres AS melalui House Democracy Assistant Commission (HDAC) mengenai hal-hal yang akan diperoleh dari kunjungannya ke Amerika Serikat. Hal ini dilakukan guna memastikan kunjungan kerja BURT dapat berjalan efisien dan efektif.

Bahkan lanjutnya, Kongres AS telah mempersiapkan agenda pertemuan dengan sistem pendukung yang dituju sesuai dengan kebutuhan program kunjungan kerja Delegasi BURT.

“Saya berharap dengan dari kunjungan tersebut akan menghasilkan berbagai masukan terhadap upaya perbaikan kinerja DPR melalui reformasi sistem pendukung DPR-RI,” ungkap politisi Partai Demokrat.

Sebelumnya Indria mengungkapkan, salah satu agenda internal DPR dalam upaya meningkatkan kinerjanya adalah menyusun Rencana Strategis DPR yang didalamnya memuat agenda meningkatkan efektifitas kerja dalam melaksanakan tiga fungsi Dewan, pengelolaan anggaran DPR yang lebih mandiri, akuntabel dan transparan serta melakukan reformasi sistem pendukung DPR.

Dalam kaitan ini, menurut Indria Muaja,

BURT berusaha untuk focus pada agenda Prioritas Reformasi yang telah disepakati serta terus berupaya agar segera dilakukan Reformasi Sistem Pendukung DPR dalam hal ini Kesekjenan DPR. Tujuannya adalah menuju DPR yang berkinerja tinggi dengan tata kelola yang baik (good governance) dan lebih responsive terhadap public.

Lebih lanjut dikatakan, agenda peningkatan kinerja DPR ini juga menjadi sorotan (HDAC). Kongres AS yang telah dua kali melakukan kunjungan ke DPR dalam rangka sosialisasi penguatan demokrasi melalui parlemen yang kuat. HDAC sangat mendukung upaya DPR dalam melakukan perubahan ini. Karena itu menurut Pimpinan BURT dari Partai Demokrat ini, HDAC akan sangat mendukung apabila BURT DPR mau melakukan kunjungan ke Kongres AS. **(mp)**

KOMISI II DPR TINJAU LOKASI BENCANA ALAM BOLSEL

Komisi II DPR RI melakukan peninjauan ke Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel), Propinsi Sulut sekaligus melihat sejumlah lokasi bencana alam yang menimpa daerah itu pada pertengahan Juli 2008 lalu.

Dipimpin langsung Ketua Komisi II, EE Mangindaan, Tim Komisi II menyaksikan sejumlah kerusakan infrastruktur akibat bencana alam menyebabkan program percepatan pembangunan di daerah itu terganggu.

“Sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam sebaiknya segera ditangani secara baik, sehingga tidak mengganggu kepentingan masyarakat,” kata Mangindaan.

Sejumlah infrastruktur atau fasilitas umum

yang rusak akibat banjir dan tanah longsor, seperti akses jalan dan jembatan, lahan pertanian dan sebagainya.

Komisi II DPR RI juga mengharapkan pengembangan sarana transportasi terus diperhatikan, kemudian pengembangan potensi hasil alam.

Pengembangan potensi hasil alam harus diperhatikan dengan baik, terutama meningkatkan produksi dan pemasaran, sehingga tingkat perekonomian rakyat

meningkat.

Sebelumnya, bencana alam di Bolsel pada 17 Juli 2008 lalu, menyebabkan kerugian materi diperkirakan mencapai Rp70 miliar, dengan kerugian terbesar terjadi pada sejumlah infrastruktur pembangunan, seperti jalan, jembatan, ratusan rumah warga rusak serta lahan pertanian hancur.

Lokasi terbesar bencana alam itu, berada di Kecamatan Bolaang Uki, Pinolosian Timur, Pinolosian Tengah, sementara beberapa desa yang ada, Salongo Tobayagan hingga Posilagon masih terisolir.

Bahkan ada beberapa jalan dan jembatan rusak total atau putus dan tidak bisa difungsikan lagi, beberapa bendungan dan irigasi rusak, serta kuatnya arus air akibat banjir, menyebabkan hilangnya tujuh rumah warga dan kerusakan rumah lainnya di Pinolosian Timur.(nt)

EKA SANTOSA : DEPDAGRI HARUS AMBIL PERAN SEBAGAI LOKOMOTIF REVISI UU OTDA

Wakil Ketua Komisi II DPR Eka Santosa mengatakan, Depdagri harus mengambil peran maksimal sebagai lokomotif dari revisi UU Otonomi daerah. “Terlihat masih adanya persepsi berbeda antara Surat Keputusan yang dikeluarkan Depdagri dengan Depkeu terkait keuangan Daerah,” kata Eka saat Kunker ke Provinsi Sumbar baru-baru ini.

Selain itu, terang Eka, terkait data kependudukan jangan terlalu di ekspand keluar negeri apalagi terkait pengembangan Sistem Induk Administrasi Kependudukan (SIK). “Kita merencanakan target single identity number segera tuntas sehingga permasalahan seperti DPT Pemilihan legislatif dan Pilpres tidak terulang kembali.

Eka mengakui APBN masih terbatas namun hal tersebut harus segera dioptimalisasikan guna menuntaskan penataan administrasi kependudukan. “Jangan sampai adanya campur tangan asing karena itu kita ingin anggaran terkait kependudukan murni dari dalam negeri,” terangnya.

Saat ini, terang Eka, DPR sedang menggalakan Reformasi agraria dan pedesaan dalam bentuk legislasi. “Kita telah memiliki pansus pedesaan yang berusaha menata dan meningkatkan kesejahteraan desa-desa di

Indonesia,” katanya.

Untuk tenaga honorer, Eka mengatakan, masalah ini akan terus berlanjut apabila pemerintah daerah terus membuka tenaga

honor di berbagai dinas. “DPR akan menuntaskan tenaga honorer sehingga tidak menumpuk seperti sekarang,” lanjutnya. (si)

KOMISI II DPR KECEWA GUBERNUR SUMBAR TIDAK HADIR

Tim Kunker Komisi II DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Eka Santosa kecewa dengan ketidakhadiran Gubernur Sumbar saat tim mengunjungi Provinsi Sumbar. “Kita ingin meminta pertanggungjawaban Politik dari Gubernur Sumbar karena yang utama kita mengharapkan pernyataan kebijakan Gubernur karena Asda I tidak dapat mengambil kebijakan atau keputusan,” terang Eka saat Konferensi Pers seusai Rapat dengan KPUD Sumbar, baru-baru ini.

Menurut Eka, pejabat yang mewakili tidak dapat mengambil keputusan atau kebijakan terkait program Pemerintah daerah misalnya saja sinkronisasi UU No.32 tentang otonomi daerah dengan agraria. “Kita sangat perhatian terhadap Pemprov Sumbar, karena itu kita ingin

melegitimasi kekhasan Sumatra Barat agar dapat dimasukkan didalam UU nantinya,” katanya.

Dia menambahkan, penataan tanah yang terkait UU Agraria memang harus diletakan dalam bingkai UU yang merangkum keanekaragaman di berbagai daerah. “Yang perlu dipikirkan adalah UU otda dikaitkan dengan UU Agraria seperti masalah Ulayat,” terangnya.

Sebelumnya, Eka mengaku senang saat diundang Gubernur di kantor kerjanya, namun ternyata yang hadir bukan Gubernur tetapi hanya pejabat teras Pemda. “Sama seperti acara hari ini, harusnya yang hadir Panwaslu namun tidak hadir bahkan telat ini artinya kita sesama lembaga harus saling menghormati, karena itu secara konstitusional kedudukan lembaga negara harus diletakan dalam bingkai kehidupan

berbangsa dan bernegara. "Kita sangat kagum terhadap Provinsi Sumbar yang telah melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Bung Hatta dan Agus Salim," ungkapnya.

Sementara Zuhendri Chaniago (PBR) mengatakan, secara konstitusi DPR secara lembaga sangat kecewa dan sangat memalukan secara kelembagaan. "Sebelumnya jadwal sudah dikirim 2 minggu sebelumnya oleh sekretariat komisi ke Pemerintah daerah Sumbar," katanya. bahkan tadi telah disampaikan Gubernur menerima kita saat di kantor Gubernur namun ternyata tidak hadir dan diwakili oleh Sekda dan jajarannya. "ini tidak biasa daerah dalam menerima tamu," katanya.

Hal senada disampaikan oleh Andi Wahab

DT. Majokayo (F-PG), dirinya sangat malu terhadap penerimaan tamu oleh Pemprov Sumbar. "Saya sebagai putra daerah malu dengan perlakuan seperti ini," terangnya.

Menurutnya, dirinya tidak menemui lagi keramahan, peradaban di Sumbar. "Pemda ini perlu dengan dukungan anggota DPR, bahkan seluruh Indonesia datang ke Komisi II DPR menyampaikan aspirasinya namun tidak pernah terlihat Sumbar datang ke Senayan," katanya.

Eka mengatakan, secara protokoler DPR bisa menolak ketidakdatangan Gubernur namun dirinya menganggap ada problem besar terkait pelestarian tradisional kekhasan Minangkabau. "Karena itu kita butuh respons dari pimpinan daerah," katanya.

Dia menambahkan, hal ini harus menjadi pelajaran bagi bangsa dan karena itu pemda harus ada prioritas terhadap berbagai persoalan. "Kita semua datang dengan perwakilan Sekab, Sekneg, artinya ini perjalanan resmi dan konstitusional," katanya

Bahkan, papar Eka, Pemda tidak memberikan jawaban tertulis dan respon yang baik terhadap berbagai persoalan. "Ini pertanyaan DPR dibundel dan dijilid serta disampaikan dengan baik kepada Pemda," terangnya.

Menurut Eka, Komisi II DPR akan mengevaluasi dan membahas masalah ini didalam internal Komisi II DPR. "Jangankan Gubernur warga negara saja bisa dipanggil oleh DPR sebagai institusi negara," jelasnya. (si)

SISTEM PILKADA KEMBALI KE SISTEM LAMA

Anggota DPR dari PPP Romzi Nihan mengatakan, DPR saat ini sedang mengevaluasi dan menampung masukan terkait revisi UU No. 32 tahun 2004 dan UU Pemda. "Nantinya apakah perlu pemilihan bupati dan walikota di Indonesia pada masa mendatang dan mungkin tidak akan lagi secara langsung tetapi kembali kepada sistem lama," kata Romzi dihadapan jajar Pemda Sumbar baru-baru ini.

Menurut Romzi, pemilihan langsung kepala daerah prinsipnya tidak sesuai dengan

UUD 45 karena menurut UU, paparnya yang termasuk pemilihan langsung DPR/DPD Kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden. "Demokratisasi banyak model atau macamnya sehingga banyak pemikiran mengarah untuk dikembalikan pemilihan DPRD nantinya," terangnya

Dia menambahkan, kepala daerah yang terpilih sekarang tidak ada jaminan memahami bidang pemerintahan karena ada yang terpilih sama-sama dari kalangan profesional. "jadi pasangan kepala daerah profesional

didampingi pejabat yang telah lama di pemerintahan," paparnya.

Menurut Romzi, kekhawatiran pilkada saat ini karena besarnya biaya politik dan tampilnya pemimpin daerah yang kurang memuaskan rakyat. "Kita mengharapkan pemerintah memiliki standar sehingga bisa menjawab tuntutan dan perkembangan saat ini," katanya.

nantinya, terang Romzi, DPRD dapat memberikan analisa terhadap calon atau figur yang akan dipilih dengan mencermati masukan-masukan dari masyarakat. "ini tidak mengecilkan fungsi DPRD dan menghilangkan aspirasi masyarakat sementara aspirasi bisa disampaikan kepada anggota DPR," katanya. (si)

ROMZI NIHAN : PENGELOLAAN ARSIP DI SUMBAR BELUM OPTIMAL

Anggota DPR dari PPP Romzi Nihan menilai, kearsipan apabila digabungkan dengan perpustakaan tidak cocok karena perpustakaan bersifat terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat umum sedangkan kearsipan bisa tertutup dengan syarat-syarat tertentu. "pengelolaan masalah kearsipan seringkali belum optimal karena adanya penggabungan tersebut di beberapa daerah," paparnya dihadapan Jajaran Pemda Sumbar baru-baru ini.

Ia menambahkan, kasus sengketa seringkali bermula dari tidak jalannya pengarsipan data sehingga penyelesaiannya menjadi semakin ruwet. "Dasar pemikiran

pemisahan antara kearsipan dan perpustakaan berkaitan dengan pelaksanaan PP No.38/2007 tentang pembagian urusan pemerintahan dan PP 41/2007 tentang organisasi perangkat daerah. "Karena itu kita minta pendapat dari pemerintah daerah karena targetnya RUU Kearsipan nasional akan diselesaikan September 2009," katanya.

Menurut Romzi, Kearsipan memiliki beban tugas yang berat karena harus merangkul seluruh perangkat daerah dan dokumen seluruh pemerintahan daerah.

Sementara Asda I Sinang Subekti mengakui, arsip lama banyak yang hilang di Sumatra Barat karena itu, tegasnya, perlu ada

sanksi tegas terhadap Pegawai yang telah menghilangkan arsip. "Kita mengharapkan ada standar kesehatan dalam merawat arsip khususnya bagi arsiparis," katanya.

Sinang mengatakan, perlu adanya peningkatan keahlian SDM dengan cara, melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas keahlian pelayanan publik. "Selain itu, kinerja juga sering tergantung kepada leadership bukan sistem ini menjadi masalah klasik yang dihadapi oleh Provinsi Sumbar," ungkapnya.

Menyinggung pelaksanaan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) di Provinsi Sumbar, Sinang menjelaskan, sampai sekarang Sumbar masih belum melaksanakan SIAK secara konsisten karena keterbatasan SDM di Sumbar. "Baru 2 daerah yang melaksanakan SIAK diantaranya Solok, dan Padang Panjang," terangnya. (si)

WALIKOTA SOLOK USUL WAKIL KEPALA DAERAH DIPILIH BUKAN PAKET

Walikota Solok Syamsu Rahim mengusulkan Komisi II DPR merevisi PP 109 Tahun 2002 terkait kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Saat ini tunjangan kepala daerah khususnya gaji walikota hanya Rp.21 Juta/bulan dan bila termasuk tunjangan sekitar Rp 6 Juta/bulan sedangkan wakil kepala daerah hanya sekitar Rp 5.2 Juta/bulan termasuk

tunjangan,”katanya dihadapan anggota Komisi II DPR di Kantor Gubernur Sumbar, baru-baru ini.

Sementara, terang Walikota Solok, tunjangan kepala daerah disamakan dengan PNS yang menduduki jabatan struktural, sementara perjalanan dan kegiatan kepala daerah cukup padat serta banyak tuntutan.

Dia menegaskan, tantangan kepala daerah cukup besar sementara gaji yang diterima

cukup banyak dan tak sebanding dengan kegiatan sosial dan tim sukses yang mendukungnya. “Ini jelas tidak cukup buat operasional,”katanya.

Dia menambahkan, perlu ada pemikiran cerdas mengenai bagaimana mengemas pemilihan kepala daerah dimasa mendatang. “Misalnya yang dipilih langsung kepala daerah sementara wakilnya dipilih oleh walikotanya,”katanya.

Saat ini, paket bupati/walikota sering tidak harmonis pada masa mendatang. “Kita berharap komisi II DPR bisa menerima usulan ini,”paparnya. (si)

DIDIEK J. RACHBINI: BANYAK PERGURUAN TINGGI TIDAK MANDIRI

Wakil Ketua Komisi X DPR Didik J Rachbini mengatakan banyak lulusan perguruan tinggi tidak mandiri, sehingga sebagian hanya sebagai pencari kerja dan meningkatkan persentase pengangguran. Wakil Ketua Komisi X DPR Didik J Rachbini mengatakan banyak lulusan perguruan tinggi tidak mandiri, sehingga sebagian hanya sebagai pencari kerja dan meningkatkan persentase pengangguran.

Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula persentase pengangguran terhadap total angkatan kerja di level pendidikan tersebut,” kata Didiek usai bertemu dengan unsur perguruan tinggi di Lampung, di Universitas Lampung (Unila), saat kunjungan kerja pada reses masa persidangan IV tahun sidang 2008—2009, Bandarlampung, Selasa (13/7).

Ia menjelaskan, kualitas mental dan kemandirian sebagian besar lulusan dari perguruan tinggi masih kurang, sehingga setelah lulus hanya menadahkan tangan mencari kerja.

“Para lulusan itu bukan membuat terobosan-terobosan untuk kemandiriannya, tetapi hanya menanti dapat pekerjaan,” terang dia.

Didiek yang hadir bersama sejumlah anggota Komisi X lainnya, menjelaskan bangsa ini memiliki kemampuan kewirausahaan yang tergolong rendah di dunia.

“Untuk mengatasi itu semua adalah melalui pendidikan. Ini suatu tantangan bagi para pendidik,” katanya. Sebab, lanjutnya, dengan pendidikan dapat mengubah mental,

karena itu perlunya kurikulum yang mengajarkan ke arah perubahan tersebut.

“Ini menjadi tantangan bagi dosen dan pengajar lainnya. Tidak hanya memberikan pendidikan teknis,” kata dia.

Didik juga menambahkan, dalam pembahasan undang-undang kepemudaan dimasukkan tentang kewirausahaan dan kepemudaan.

Menurut Didik J. Rachbini, kepala rombongan Komisi X itu, kunjungan tersebut bertujuan melaksanakan fungsi DPR dalam hal pengawasan legislasi dan penganggaran serta menyerap aspirasi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.

“Sesuai jadwal DPR RI pada reses masa persidangan IV tahun sidang 2008—2009, kami dari Komisi X yang mengkhususkan bidang Depdiknas, Depbudpar, Kemenagpora, dan Perpustakaan melaksanakan kunjungan untuk melakukan komunikasi yang intensif antara DPRRI khususnya Komisi X dengan pemda dan lembaga masyarakat di Provinsi Lampung berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, program atau kegiatan pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pemuda dan

olahraga serta penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Lampung,” kata dia.

Selain dihadiri Rektor Unila Sugeng P. Harianto, pertemuan di ruang Sidang Rektorat Universitas Lampung itu juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Jhonson Napitupulu, dari Kopertis Wilayah II Diah Natalisa, Direktur Teknokrat Nasrullah Yusuf, serta utusan dari perguruan tinggi swasta lainnya.

Didik memaparkan beberapa pokok bahasan yang harus ditanggapi oleh pimpinan perguruan tinggi baik negeri dan swasta di antaranya mengenai persoalan badan hukum pendidikan, sertifikasi dosen, persoalan riset, masalah kurangnya tenaga guru di Lampung, sekolah rintisan berstandar internasional, pemisahan antara pendidikan dasar menengah, dan perguruan tinggi hingga persoalan terpinggirkannya posisi taman kanak-kanak (TK) dengan pendidikan anak usia dini (PAUD).

Sementara Dekan Fakultas Pertanian Unila Wan Abas Zakaria mengatakan sangat sepekat dengan rencana Dewan memisahkan kementerian pendidikan nasional untuk mengakomodasi kepentingan perguruan tinggi dan riset dengan pendidikan dasar dan menengah. “Dengan adanya pemisahan tersebut diharapkan pemerintah dapat lebih fokus memperhatikan pendidikan tinggi serta memajukan dunia riset di perguruan tinggi,” kata dia.

Mengenai kepemudaan, Agustian staf pengajar muda dari Umitra meminta Dewan mengerahkan semangat generasi muda ke arah ekonomi kreatif yang kini marak di negara Asia.

“Dunia pendidikan kita harus memiliki konsep yang spesifik, misalkan kewirausahaan atau ekonomi kreatif dari tingkat dasar,

menengah atas, hingga perguruan tinggi.
"Thailand, Singapura, Vietnam sekarang telah mengerahkan 20 persen anggarannya

untuk dialokasikan kepada membangun ekonomi kreatif bagi generasi mudanya. Hal ini dapat diterapkan di Lampung, misalkan

membangun sekolah dengan konsep ekonomi kreatif khusus tapis baik di SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi," ungkapnya.(et)

KOMISI X DPR RI KAGET ATAS KETIDAK-JELASAN ANGGARAN PENDIDIKAN

Anggota Komisi X DPR Munawar Sholeh mengaku kaget atas ketidakjelasan Pemprov Lampung terhadap anggaran 20 persen untuk pendidikan, sebagaimana dilontarkan Sekretaris Bappeda Lampung, Edarwan.

"Padahal Undang-undang yang kami buat tersebut sudah sangat jelas. Kalau seperti ini berarti sosialisasinya kurang mengena," kata dia pada pertemuan Komisi X DPR dan Pemprov Lampung, di Bandar Lampung, Bandar Lampung, Senin (12/7).

Dai mengakui, persepsi antara Komisi X DPR dengan pemerintah berbeda terkait anggaran 20 persen dari APBN.

"Kami memandang anggaran untuk

pendidikan belum mencukupi 20%, karena itu harus di luar gaji guru dan kedinasan," kata dia dalam kunjungan kerja pada reses masa persidangan IV tahun sidang 2008—2009 itu.

Namun, kata Munawar, Mahkamah Konstitusi telah "menyelamatkan" wajah pemerintah dengan memasukkan gaji guru dalam cakupan 20 persen tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung, Edarwan, menanyakan kejelasan tentang persentase anggaran pendidikan tersebut yang diambil dari APBN atau APBD.

Ia meminta kejelasan apakah hanya pendidikan formal, namun pihaknya melihat pendidikan non-formal pun perlu

mendapatkan suntikan dana tersebut.

"Kami memandang kegiatan pendidikan non-formal yang juga untuk meningkatkan taraf ekonomi dan modal kerja dimasukkan dalam program tersebut," kata dia.

Edarwan memperinci, sebaran alokasi dana pendidikan tahun 2009 yakni untuk belanja tidak langsung pendidikan 6,6 persen, belanja langsung dinas pendidikan 51,9 persen, hibah pendidikan 5,4 persen, pos bantuan pendidikan 6,7 persen, dan belanja pendidikan pada SKPD diluar dinas pendidikan atau sebaran mencapai 29,4 persen.

"Untuk alokasi APBD sektor pendidikan masyarakat tersebar ke 28 SKPD," katanya.

Sementara itu, anggaran untuk pendidikan tersebut yang dialokasikan dari APBD Lampung Rp312 miliar dari total Rp1,563 triliun atau mencapai 20,12 persen. (et)

KOMISI X MINTA PERGURUAN TINGGI KAJI RSBI

Komisi X DPR meminta kalangan perguruan tinggi di Lampung melakukan riset tentang rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI). Pasalnya, RSBI ditengarai merupakan sekolah berbiaya tinggi.

"Salah satu fungsi perguruan tinggi yaitu melakukan riset yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Di antaranya penelitian terhadap kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Contohnya RSBI yang dianggap membebani masyarakat, karena itu perlu pengkajian," kata anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP Lukman Hakiem saat kunjungan kerja ke Universitas Lampung (Unila) pada reses masa persidangan IV tahun sidang 2008—2009, Selasa (13/7).

Lukman berharap, melalui riset tersebut perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dapat mencari konsep alternatif sekolah dengan mutu tinggi, tapi berbiaya murah.

Selain dihadiri Rektor Unila Sugeng P. Harianto, pertemuan di ruang Sidang Rektorat Universitas Lampung itu juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Jhonson Napitupulu, dari Kopertis Wilayah II Diah Natalisa, Direktur Teknokrat Nasrullah Yusuf, serta utusan dari perguruan tinggi swasta lainnya.

Mengetahui kurangnya tenaga guru di Lampung, Direktur Teknokrat Nasrullah Yusuf mengusulkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan tenaga lulusan dari IKIP maupun FKIP, tetapi juga mau menerima mahasiswa lulusan ilmu murni nonpendidikan.

"Sebenarnya mahasiswa lulusan ilmu murni telah memiliki kompetensi di bidangnya, mereka tinggal melengkapi ilmunya di bidang kependidikan," kata dia.

Sedangkan Koordinator Diskopertis Diah Natalisa mengaharapkan Dewan turut memperhatikan perkembangan perguruan

tinggi swasta. Salah satu hal yang menjadi persoalan yang ia temui di PTS adalah persoalan akreditasi dan persoalan sertifikasi dosen swasta.

"PTS termasuk terlambat dalam mengakreditasi program studi yang mereka miliki, itu pun setelah kami intens memberikan dorongan dan sosialisasi mengenai pentingnya akreditasi program studi bagi lulusan PTS karena *stakeholder* menyaratkan akreditasi proogram studi ketika melamar kerja," kata dia.

Sementara Dekan Fakultas Pertanian Unila Wan Abbas Zakaria menyarankan, perlunya revitalisasi perguruan tinggi di Indonesia yang mengelola pertanian.

"Animo lulusan SMA untuk masuk ke fakultas pertanian trennya kian menurun, dan pemerintah kurang memperhatikan hal itu," katanya.

Padahal, lanjut dia, Indonesia masih bergantung kepada sektor pertanian, namun yang lebih difokuskan saat ini adalah kekurangan tenaga pengajar atau guru, sedangkan tenaga ahli pertanian sepertinya diabaikan. (et)